

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir dari analisis ekonomi politik historis yang telah dilakukan, merumuskan kontribusi teoretis dan praktis penelitian, mengidentifikasi keterbatasan studi, serta menyajikan saran kebijakan yang terukur dan relevan. Keseluruhan bab ini bertujuan untuk menjawab secara tuntas rumusan masalah dan serangkaian pertanyaan penelitian mengenai konfigurasi relasi kuasa yang melanggengkan paradoks kebijakan energi di Indonesia.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini secara tegas menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pertama, mengenai konfigurasi aktor sosial dan kelas, penelitian ini menyimpulkan bahwa paradoks kebijakan energi dibentuk dan dilanggengkan oleh jejaring kompleks antara elemen negara, BUMN, dan oligarki korporasi. Konfigurasi ini melibatkan kolusi sistematis antara pejabat internal BUMN di berbagai tingkatan dengan aktor swasta yang memiliki koneksi politik kuat, dengan Presiden sebagai episentrum pengambilan keputusan. Mereka secara kolektif mempertahankan *status quo* yang menguntungkan, sementara kekuatan penyeimbang seperti masyarakat sipil hanya memiliki ruang terbatas untuk membongkar struktur yang telah mengakar ini.

Kedua, mengenai mekanisme dan relasi kuasa yang mereproduksi paradoks kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa paradoks tersebut—yakni komitmen formal terhadap standar emisi Euro 4 (PermenLHK P.20/2017) yang secara sistematis dilumpuhkan oleh pelanggaran kebijakan BBM berkualitas rendah—direproduksi melalui tiga mekanisme utama yang saling terkait. Pertama adalah pelanggaran kebijakan subsidi dan kompensasi yang menciptakan "jebakan politik" dan disinsentif pasar. Kedua, pembajakan tata kelola energi melalui praktik korupsi sistematis dalam rantai pasok, yang memastikan ketergantungan impor tetap menguntungkan segelintir elite. Ketiga, kamufase wacana teknokratis, di mana argumen "ketidaksiapan kilang" digunakan untuk melegitimasi penundaan

investasi infrastruktur, yang pada dasarnya adalah pilihan politik untuk mempertahankan mekanisme perburuan rente.

Kedua jawaban utama ini didasarkan pada temuan yang secara lebih rinci mengungkap jejak historis paradoks tersebut. Analisis menemukan bahwa jejak historis paradoks ini berakar pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, di mana kebijakan subsidi BBM dilebagakan sebagai instrumen vital untuk membeli stabilitas politik. Kebijakan ini menciptakan "jebakan politik" dan ekspektasi publik yang kuat, yang kemudian menjadi jalur ketergantungan (*path dependency*) dan membatasi ruang gerak setiap presiden pasca-reformasi. Pemerintahan transisi dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputri—yang di eranya Indonesia menjadi *net oil importer* pada 2004—lebih memprioritaskan stabilitas demokrasi yang rapuh dibanding melakukan reformasi energi fundamental. Dilema ini diwarisi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang meskipun beberapa kali menaikkan harga BBM, tidak pernah membongkar struktur subsidi dan perburuan rente yang justru semakin menguat.

Faktor-faktor sistemik yang melanggengkan paradoks ini menjadi semakin jelas pada era Presiden Joko Widodo. Dualisme kebijakannya sangat menonjol: di satu sisi, ia mengambil langkah progresif awal pada 2015 dengan menghapus subsidi Premium dan membubarkan Petral. Namun di sisi lain, terjadi "kegagalan perencanaan strategis" yang fatal. Pemerintah membiarkan skema kompensasi Peralite yang tidak transparan menggantikan skema subsidi lama, yang bebannya justru lebih besar. Di tengah lemahnya pengawasan tingkat puncak ini, tata kelola energi kembali dibajak oleh jejaring aktor kolusif antara pejabat BUMN dan oligarki korporasi melalui mekanisme perburuan rente yang disamarkan dengan "kamufase wacana teknokratis." Puncaknya adalah skandal korupsi sistematis sebesar Rp 285 triliun di Pertamina pada periode 2018–2023.

Implikasi dari seluruh dinamika ini sangat merusak. Negara dan masyarakat menanggung "beban ganda": kerugian fiskal masif (proyeksi subsidi Rp 187 triliun pada 2024 dan kerugian akibat korupsi), serta biaya kesehatan publik akibat polusi udara yang parah (diperkirakan mencapai Rp 51,2 triliun per tahun di Jakarta). Warisan krisis sistemik inilah yang kini dihadapi oleh pemerintahan Presiden

Prabowo Subianto, yang menempatkannya pada titik krusial: melanggengkan kontinuitas yang merusak atau melakukan disrupsi struktural yang fundamental.

5.2 Kontribusi Penelitian

5.2.1 Kontribusi Teoretis

Kontribusi teoretis utama dari penelitian ini terletak pada aspek metodologis dan konseptualnya. Pertama, secara metodologis, penelitian ini merupakan salah satu karya pertama di Indonesia yang secara sadar dan eksplisit mengadopsi pendekatan Ekonomi Politik Historis (EPH) sebagai kerangka analisis utama. Jika kajian ekonomi-politik di Indonesia umumnya berhenti pada deskripsi kebijakan atau dinamika oligarki secara kontemporer, penelitian ini secara formal menelusuri kesinambungan historis (*path dependency*) dari struktur kekuasaan ekonomi-politik sejak Orde Baru hingga Reformasi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi pionir dalam memperkenalkan dan mengoperasionalkan pendekatan EPH dalam ranah kajian kebijakan publik di Indonesia. Kedua, secara konseptual, penerapan pendekatan EPH ini telah menghasilkan beberapa temuan yang memperkaya pemahaman teori yang ada:

- Penelitian ini menunjukkan secara empiris bagaimana konsep "demokrasi predatis" dan "kontinuitas dalam diskontinuitas" beroperasi secara konkret dalam sektor energi pasca-Reformasi.
- Penelitian ini memberikan contoh kasus yang jelas tentang bagaimana "kamufase wacana teknokratis" digunakan sebagai mekanisme pertahanan kekayaan oleh oligarki.
- Penelitian ini menempatkan Presiden sebagai aktor sentral dalam analisis *path dependency* kebijakan publik, menunjukkan bagaimana pilihan politik di tingkat tertinggi menjadi penentu dalam melanggengkan atau membongkar struktur warisan masa lalu.

5.2.2 Kontribusi Praktis

Secara praktis, penelitian ini membongkar narasi "kendala teknis" dan menyajikan bukti bahwa akar masalah terletak pada pilihan politik di tingkat tertinggi. Ini memberikan landasan argumentasi yang kuat bagi masyarakat sipil dan pembuat kebijakan progresif untuk mendorong reformasi yang menargetkan akar masalah: struktur rente, fragmentasi kelembagaan, dan urgensi intervensi langsung dari Presiden untuk memimpin perubahan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Seperti penelitian lain, kajian ini memiliki keterbatasan tertentu yang perlu dicatat agar interpretasi hasil tetap proporsional dan objektif, yaitu:

1. Akses Data: Terdapat kesulitan dalam mengakses data primer yang sangat sensitif, seperti detail kontrak impor dan tender BBM di Pertamina, yang membatasi analisis kuantitatif lebih lanjut mengenai mekanisme rente yang tersembunyi.
2. Cakupan Waktu: Data kuantitatif yang digunakan dalam analisis ini terbatas hingga awal tahun 2025. Dinamika kebijakan dan pasar pasca-periode tersebut, terutama di bawah pemerintahan baru, belum tercakup dalam penelitian ini.
3. Fokus Penelitian: Analisis secara spesifik berfokus pada dinamika kebijakan BBM dan kebijakan Euro 4. Sektor energi lain yang relevan, seperti transisi ke energi terbarukan (EBT) atau kebijakan terkait batu bara, tidak dianalisis secara mendalam.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan bahwa akar masalah kebijakan energi adalah pilihan politik yang berpusat pada Presiden, maka saran yang dirumuskan di sini berfokus pada intervensi struktural yang menuntut kepemimpinan politik tingkat tinggi.

5.4.1 Saran Kebijakan

1. Pembentukan Gugus Tugas Nasional di Bawah Mandat

Langsung Presiden

- Rasionalisasi: Temuan penelitian membuktikan bahwa fragmentasi birokrasi antar kementerian adalah hambatan sistemik. Hanya sebuah badan terpusat dengan otoritas politik langsung dari Presiden yang dapat memaksa konsolidasi kebijakan dan mengatasi resistensi sektoral.
- Mekanisme Implementasi:
 - Struktur: Dipimpin oleh Kemenko Perekonomian, namun diberi mandat langsung melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan melapor secara berkala kepada Presiden.
 - Mandat Tunggal: Mempercepat implementasi 100% BBM Euro 4 dari target 2028 menjadi selambat-lambatnya akhir 2027.
- Indikator Keberhasilan Kunci (KPI): Terbitnya Perpres pembentukan Gugus Tugas pada Kuartal I 2026.

2. Reorientasi Fiskal dari Subsidi Konsumtif ke Investasi

Produktif

- Rasionalisasi: Temuan penelitian menunjukkan bahwa ini adalah pilihan politik, bukan masalah ketiadaan dana, karena biaya investasi modernisasi kilang (\$816 juta) jauh lebih kecil dibandingkan beban subsidi dan kompensasi tahunan (Rp 187 triliun).
- Mekanisme Implementasi:
 - Aksi: Mengalihkan kurang dari 10% dari anggaran kompensasi energi tahunan untuk mendanai penuh biaya investasi modernisasi kilang Pertamina.
 - Transisi: Merancang reformasi skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis orang (bantuan langsung tunai) untuk melindungi masyarakat rentan.

- Indikator Keberhasilan Kunci (KPI): Alokasi anggaran spesifik untuk modernisasi kilang dalam APBN 2027 dan penurunan kuota BBM berkualitas rendah sebesar 25%.

3. Menjadikan Adopsi BBM Euro 4 sebagai Prioritas Jangka Pendek Utama

- Rasionalisasi: Ini adalah "tuas kebijakan tunggal dengan dampak terbesar" yang dapat mengurangi emisi PM2.5 hingga 36% dan secara langsung menjawab krisis kesehatan publik yang menjadi salah satu "beban ganda" negara.
- Mekanisme Implementasi:
 - Komunikasi: Meluncurkan kampanye publik yang dipimpin langsung oleh figur pemerintah tingkat tinggi untuk mengedukasi masyarakat tentang "beban ganda" dari BBM kotor.
 - Implementasi Cepat: Memastikan ketersediaan 100% BBM Euro 4 di seluruh wilayah Jabodetabek dalam 1 tahun sebagai proyek percontohan nasional.
- Indikator Keberhasilan Kunci (KPI): Tercapainya 100% ketersediaan BBM Euro 4 di seluruh SPBU nasional pada akhir tahun 2027.

Ketiga rekomendasi ini, apabila dijalankan secara konsisten, dapat menjadi titik masuk untuk membongkar struktur rente yang melanggengkan paradoks energi di Indonesia.

5.4.2 Saran Penelitian Lanjutan

1. Studi Komparatif Regional: Meneliti bagaimana negara lain di ASEAN (misalnya Malaysia dengan Petronas atau Thailand dengan PTT) berhasil mengurangi praktik rente dan mempercepat adopsi standar emisi. Perbandingan ini akan memperkaya analisis strategi reformasi di Indonesia.
2. Analisis Kuantitatif Dampak Sosial-Ekonomi Reformasi Subsidi: Menggunakan data survei rumah tangga dan model ekonometrik

untuk mengukur dampak reformasi subsidi terhadap kelompok rentan, serta menguji efektivitas bantuan langsung tunai sebagai mekanisme kompensasi.

3. Studi Khusus tentang Tata Kelola BUMN Energi: Melakukan kajian mendalam terhadap dinamika internal Pertamina (struktur organisasi, budaya birokrasi, hubungan dengan pemerintah)

untuk memahami bagaimana praktik rente direproduksi di tingkat institusi.

4. Analisis Dampak Keterlambatan Adopsi Standar Emisi
Menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menghitung kerugian kompetitif industri otomotif Indonesia di pasar global akibat keterlambatan implementasi Euro 4.

5. Kajian Politik Presiden dan Agenda Reformasi Energi
Meneliti secara lebih luas bagaimana pilihan politik presiden pasca-Jokowi (terutama Prabowo) membentuk kelanjutan atau disrupti dalam kebijakan energi.

Bab ini menutup keseluruhan penelitian dengan menegaskan bahwa paradoks kebijakan energi di Indonesia merupakan produk dari kontinuitas kekuasaan oligarkis sejak Orde Baru hingga Reformasi. Jalan keluar dari lingkaran ini tidak mungkin lahir dari teknokrasi semata, melainkan membutuhkan keberanian politik di tingkat tertinggi untuk membongkar struktur rente yang mengakar. Penelitian ini, dengan segala keterbatasannya, diharapkan dapat menjadi kontribusi kritis bagi diskursus akademik dan sekaligus inspirasi bagi gerakan kebijakan progresif di masa depan.